

**“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Derajat Sarjana (S1)
Program Studi Ekonomi Pembangunan Konsentrasi Ekonomi Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Fskultas Ekonomi dan bisnis
niversitas Khairun



Diajukan oleh:

HERIYANTO NASRUN
NPM. 02031911094

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2024**

SKRIPSI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Heriyanto Nasrun
NPM : 02031911094

Dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal ~~06 Februari 2024~~ dan
dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

DEWAN PEMBIMBING :

Pembimbing I,

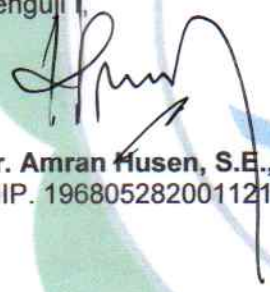

Dr. Jufri Jacob, S.E., M.Si
NIP. 197008032003121002

Pembimbing II

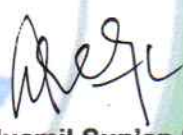

Aswir Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19660210 200212 1002

DEWAN PENGUJI :

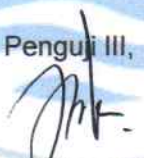
Penguji I,


Dr. Amran Husen, S.E., ME
NIP. 196805282001121001

Penguji II,


Dr. Muamil Sun'an, S.E., M.P., M.AP
NIP. 197701052001121004

Penguji III,

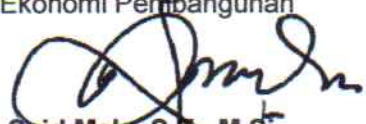

Fahima Nasar, S.E., M.Si
NIP. 197905062002122002

MENGETAHUI :

Dekan,


Muhsin N. Bailusy, S.E., M.Si
NIP. 19790019 200501 1002

Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan


Said Mala, S.E., M.Si
NIP. 19790116 200212 1 002

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Heriyanto Nasrun

NPM : 02031911094

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat
Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan

Saya menyatakan dengan benar bahwa Skripsi sebagaimana tersebut diatas adalah hasil karya saya, bukan jiplakan atau karya milik orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia menerima sanksinya sesuai peraturan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

Ternate, 07 Februari 2024

Yang membuat,



Heriyanto Nasrun
NPM.02031911094

ABSTRAK

Heriyanto Nasrun, 2024. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Ketua Komisi: Dr. Jufri Jacob, Anggota Komisi: Aswir Hadi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, sebagai bentuk pengalihan otoritas pengelolaan sektor fiskal daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerahnya. Untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK serta DBH terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Regresi linear berganda serta asumsi klasik dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan serta Halmahera Selatan Dalam Angka.

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan EVIEWS versi 10 sebagai alat uji statistik yang menunjukkan bahwa secara parsial : PAD, DAK, DAU dan DBH berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dibuktikan dengan nilai T hitung dari PAD, DAU dan DAK > dari nilai T tabel sebesar 1.68488 serta secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai F hitung sebesar 9.530593 > dari nilai F tabel sebesar 2,60 dengan nilai Prob. Sebesar 0.000018 (< 0.05) .

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pengangguran

ABSTRACT

Heriyanto Nasrun, 2023. The effect of fiscal decentralization on the unemployment rate in South Halmahera Regency. Chairman of the Commission: Dr. Jufri Jacob, Member of the Commission: Aswir Hadi.

The implementation of fiscal decentralization is a product of government policy, as a form of transferring authority to manage the regional fiscal sector, from the central government to regional governments. Regional governments are expected to be able to meet their own regional needs through managing their revenue sources and meeting the financing needs of their regional governments. To meet regional needs, regional governments have regional revenue sources that can be used, namely Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Profit Sharing Funds (DBH). Therefore, the aim of this research is to find out how PAD, DAU, DAK and DBH influence the unemployment rate in South Halmahera Regency. This research uses the multiple linear regression method and classical assumptions and uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of South Halmahera Regency and South Halmahera in Figures.

The results of this research were obtained from the results of econometric analysis after being processed using EVIEWS version 10 as a statistical test tool which shows that partially: PAD, DAK, DAU and DBH have a significant effect on unemployment as evidenced by the calculated T value of PAD, DAU and DAK > the T value table is 1.68488 and simultaneously or jointly has a significant influence with a calculated F value of 9.530593 > from the F table value of 2.60 with a Prob value Amounting to 0.000018 (< 0.05).

Keywords: Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Profit Sharing Funds (DBH), Unemployment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu, kesehatan dan hidayah. Serta Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Atas berkat dan rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten

Halmahera Selatan”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk

menyelesaikan studi pada program Sarjana Satu (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Nasrun Karim dan Ibunda tercinta Sumira Adam,serta Keluarga besar Adam Ahad yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr.M.Ridha Ajam,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Khairun
3. Bapak Muhsin N.Bailusy,SE.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
4. Bapak Said Mala,S.E.,M.Si. Selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf administrasi yang selalu memberikan dukungan maupun bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Program Studi Ekonomi Pembangunan.
5. Bapak Dr.Jufri Jacob,S.E.,M.Si dan bapak Aswir Hadi,S.E.,M.Si. Selaku komisi pembimbing, Terimakasih banyak telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

6. Bapak Dr.Amran Husen S.E.,bapak Dr.Muamil Sun'an,S.E.,M.P.,M.AP dan Ibu Fahima Nasar., S.E.,M.Si Selaku tim penguji. Terimakasih banyak atas telaah,kritik dan saran yang diberikan atas kesempurnaan skripsi ini.
7. Kasung,Rifka,farda,Ula,Pus-pus, dan kawan-kawan yang lain sebagai patner terbaik dalam mendukung dan saling menguatkan dari awal hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Ternate,Februari 2024

Heriyanto Nasrun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II KERANGKA TEORITIK	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Desentralisasi Fiskal	5
2.1.2. Tingkat Pengangguran.....	7
2.1.3. Jenis-Jenis Pengangguran.....	8
2.1.4. Faktor-Faktor Pengangguran dan Dampaknya.....	10
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah(PAD).....	13
2.1.6. Dana Alokasi Umum	16
2.1.7. Dana Alokasi Khusus.....	17
2.1.8. Dana Bagi Hasil	18
2.1.9. Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Penerimaan Pajak.....	18
2.1.10. Dana Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam	19
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Pikir.....	24

2.4. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4. Model Analisis.....	26
3.4.1. Model Regresi Linear Berganda.....	26
3.5. Uji Asumsi Klasik	27
3.6. Definisi Operasional Variabel	28
3.7. Uji Hipotesis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Gambaran Umum Unit Observasi.....	30
4.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian	31
4.3 Uji Asumsi Regresi Klasik	36
4.3.1 Uji Normalitas.....	36
4.3.3 Uji Multikolinieritas	36
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	37
4.3.5 Uji Autokorelasi	38
4.4 Statistik Deskriptif.....	38
4.4.1 Uji Statistik T.....	38
4.4.2 Uji Statistik F.....	39
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R)	40
4.5 Pembahasan.....	41
4.5.1 Pengaruh PAD terhadap pengangguran	41
4.5.2 Pengaruh DAU terhadap pengangguran	42
4.5.3 Pengaruh DAK terhadap pengangguran	42
4.5.4 Pengaruh DBH terhadap pengangguran	43

BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pikir	24
4.2 Dana Alokasi Umum	32
4.3 Dana Alokasi Khusus	33
4.4 Dana Bagi Hasil.....	33
4.5 Pendapatan Asli Daerah.....	34
4.6 Pengangguran.....	45
4.7 Uji Normalitas	36
4.8 Uji Multikolinearitas	36
4.9 Uji Autokorelasi.....	38
4.10 Uji T(Parsial).....	38
4.11 Uji F (Simultan).....	39
4.12 Uji Koefisien Determinasi.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Uji Heteroskedastisitas	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data yang telah di interpolasi	51
Lampiran 2. Uji persyaratan analisis	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, sebagai bentuk pengalihan otoritas pengelolaan sektor fiskal daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melalui pengelolaan sumber- sumber penerimaan yang dimilikinya serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerahnya. Untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana terjadi banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda dari setiap daerah. Sebagian besar daerah di berbagai wilayah di Indonesia ternyata tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, walaupun ada beberapa daerah yang berhasil dalam pencapaian tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut (R.Siagian 2010).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah sehingga daerah memiliki kewenangan dan kekuatan yang lebih besar melaksanakan kebijakan untuk menggali

pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerahnya. Berdasarkan teori federalisme fiskal, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur segala urusan di daerah, salah satu bentuknya adalah desentralisasi fiskal. Hingga saat ini, isu desentralisasi fiskal selalu menjadi pembicaraan. Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal kepada suatu daerah, dan pengukurannya dapat dilihat dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Teori Federalisme Fiskal memiliki dua perspektif teori yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dari implementasi desentralisasi, yakni menurut *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theories)*.

Melalui Pemberian otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan (Makmum,2004).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan pemerintah daerah saja, tetapi juga menyangkut efisiensi dalam pengalokasian pendapatan pemerintah daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dari pengeluaran/belanja daerah inilah pemerintah daerah diharapkan dapat menekan jumlah tingkat pengangguran di daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah ialah salah satu instrument penting guna mengontrol perekonomian. Pada sekian banyak komponen yang ada pada laporan APBD di sebutkan jika kinerja keuangan bisa terpengaruh dengan adanya belanja daerah.

Sebagai negara berkembang, Negara Indonesia tak lepas dari masalah pengangguran. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja adalah salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang adalah tingkat pendapatannya. Dengan seseorang menganggur maka akan mengurangi tingkat pendapatan yang akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Pengangguran menjadi isu yang sangat serius di berbagai negara, terutama negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Angka pengangguran di sebuah negara sering kali digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi dan industri di negara tersebut (Saputri n.d.).

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang

“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana alokasi umum (DAU) terhadap tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam melihat realitas dari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat Pengangguran.
2. Bagi akademisi dan peneliti dapat menjadi tambahan referensi mengenai pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal sebagai “sebuah fenomena rumit dengan beragam dimensi” Idealnya tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Banyak negara berkembang memanfaatkan desentralisasi fiskal sebagai solusi atas tata kelola pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, ketidakstabilan makroekonomi, dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Pengimplementasian kebijakan desentralisasi fiskal seperti kegagalan sistem ekonomi yang tersentralisasi, perubahan kondisi perekonomian internasional dan program restrukturisasi (structural adjustment programmes), serta perubahan iklim politik. Kondisi tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi di Indonesia pasca periode reformasi pada tahun 1998.

Otonomi atau desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Izzati dan Hutajulu 2021).

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara.

Desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing

kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Kresandra n.d.):

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik merupakan sebuah pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.

2. Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi administrasi adalah sebuah pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Khusaini (2006) menyatakan bahwa dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi penerimaan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemerataan pembangunan. Selain diberi

kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah juga memperoleh dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Adi 2005).

Ada beberapa prinsip dan tujuan dari diberlakukannya desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

2.1.2. Tingkat Pengangguran

Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran merupakan hal yang akan selalu muncul di dalam perekonomian, dimana saat pengeluaran agregatnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang telah tersedia di dalam perekonomian untuk dapat menghasilkan barang-barang dan juga jasa.

Menurut BPS, pengangguran adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang digolongkan sebagai penduduk usia adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Salah satu alasan pengangguran selalu muncul didalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (job search) adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimiliki oleh mereka. Namun, jika semua pekerja dan pekerjaan tidak ada bedanya, maka tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja bahwa mereka cocok dengan pekerjaan apa saja, akan tetapi pada kenyataannya bakat dan juga kemampuan seseorang itu berbeda-beda (Wahyudiana 2017).

Berikut pengertian pengangguran menurut International Labour Organization (ILO) adalah:

1. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan (Sukmaraga 2011).

Secara teoritis, permasalahan pengangguran pada awalnya diangkat oleh Adam Smith, ahli ekonomi aliran klasik yang tidak menyetujui campur tangan pemerintah yang aktif untuk mengatur kegiatan perekonomian. Saat pengangguran meningkat, ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa peran pemerintah tidak diperlukan karena melalui mekanisme pasar bebas masalah pengangguran akan teratasi dan kesempatan kerja penuh pada akhirnya dapat tercapai kembali (Putro 2016).

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Mahsunah 2013).

2.1.3. Jenis - jenis Pengangguran

Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu:

- a. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) terbuka yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.
- b. Pengangguran terselubung (Disguised Unemployment) yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetapi tidak mengurangi jumlah produksi.
- c. Setengah Menganggur (Under Unemployment) yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari tujuh jam sehari.
- d. Pengangguran musiman Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok:

- a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan (Sayifullah dan Gandasari 2016).

b. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh.

Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah.

c. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Apapun jenis pengangguran akan berdampak pada seluruh lini kehidupan manusia, baik bidang perekonomian, sosial-politik, budaya bahkan agama. Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian adalah masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada

pengangguran maka pendapatan riil masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula.

2.1.4. Faktor Pengangguran dan Dampaknya

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

1. Faktor-faktor Pengangguran

a Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Tepat

Perekonomian dinegara berkembang pada umumnya di kategorikan kedalam dua sektor yaitu sektor subsistem dicirikan sebagai sektor lamban, tradisional, terbelakang dan memiliki pengangguran yang tidak kentara. Sektor kedua yaitu sektor modern berupa pertambangan, perkebunan dan perindustrian. Pertumbuhan sektor modern akan menyerap angkatan kerja dari sektor tradisional sampai akhirnya tidak ada yang tersisah pada sektor tradisional. Namun kenyataannya Negara berkembang tidak selalu bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan industry. Penggunaan teknologi yang kurang tepat menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi kecil. Dilain sisi kurangnya upaya pelatihan tenaga kerja menyebabkan langkanya angkatan kerja yang memiliki skill, dan memaksa para pengusaha untuk memilih proses mekanisme.

b Distorsi Harga Faktor Produksi

Upah yang berlaku untuk tenaga kerja yang tidak memiliki skill di sektor modern di Negara-negara berkembang seringkali melebihi tingkat upah keseimbangan pasar karena adanya kebijakan upah minimum dari pemerintah, tekanan serikat kerja,

dan perusahaan asing yang beroperasi di Negara tersebut. Studi menunjukkan bahwa tingkat upah minimum yang tinggi menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Selain upah faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah rendahnya biaya modal dan pengangguran penduduk berpendidikan tinggi. Lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kurikulum, kelulusan dari pendidikan tinggi ini lebih suka memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya dan menolak untuk bekerja di bidang lain apalagi dengan tingkat upah di bawah standar.

Menurut Todaro dan Smith, pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan. Hal ini dikarenakan adanya revolusi pendidikan yang menyebabkan seseorang tanpa memikirkan kualitas dan hanya memikirkan kuantitasnya saja. Karena adanya peningkatan kebijakan pendidikan, sehingga hal inilah yang membuat banyak terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik di kota-kota besar sampai saat ini.

2 Dampak Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu:

a Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit, serta pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh

diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit, serta pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan.

b Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran yaitu pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan dan pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek (Saputri n.d.).

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri (Ali dan Ningsih 2021).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab/Pemko untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- Pajak Parkir

b. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan

pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan (Rasu, dkk 2019).

2.1.6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Dana alokasi umum adalah dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan netto dalam negeri yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah dan perhitungan alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-undang. Dana.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Menurut Awaniz Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Indraningrum mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (block grant) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity).

- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability).
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif.
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah.

Sedangkan menurut Halim menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

2.1.7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK antara lain untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi:

1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas.
2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC.
3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan.
4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah.
5. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.

2.1.8. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Heliyanto 2016).

Yang termasuk kedalam DBH misalnya, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). DBH dibagi berdasarkan presentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi kedalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Suparmoko, 2007). Penerimaan yang dibagi hasilnya terdiri dari :

2.1.9. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari penerimaan pajak

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Sisanya 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Daerah dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB Tahun anggaran berjalan.

b) Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB ini adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :

- 16% (enam belas persen) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
- 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota. Dan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dan penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen untuk Kabupaten/Kota dan 40% (empat puluh persen) untuk Provinsi.

2.1.10. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam

a) Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

b) Pertambangan umum

Penerimaan Pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

c) Perikanan

Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha Perikanan dan penerimaan pungutan hasil Perikanan. Penerimaan yang diterima secara nasional ini dibagikan dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota.

d) Pertambangan minyak bumi

Penerimaan Pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 84,5% (delapan puluh empat setengah persen).

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari pertambangan minyak bumi, dan Pertambangan gas 0,5% digunakan untuk menunjang pemenuhan sarana Pendidikan dasar.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kusuma Wijaya (2019),	Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, dan Pengangguran	time series dan data cross sectional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sudah dampak positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, dampak signifikan positif pada kesejahteraan sosial, dan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan berdampak pada kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi positif dampak signifikan terhadap kesejahteraan, positif tidak signifikan berdampak pada kemiskinan dan dampak signifikan positif tentang pengangguran.
2.	Riski Prasetyo Putro (2016)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatra	Penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknik analisis regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil

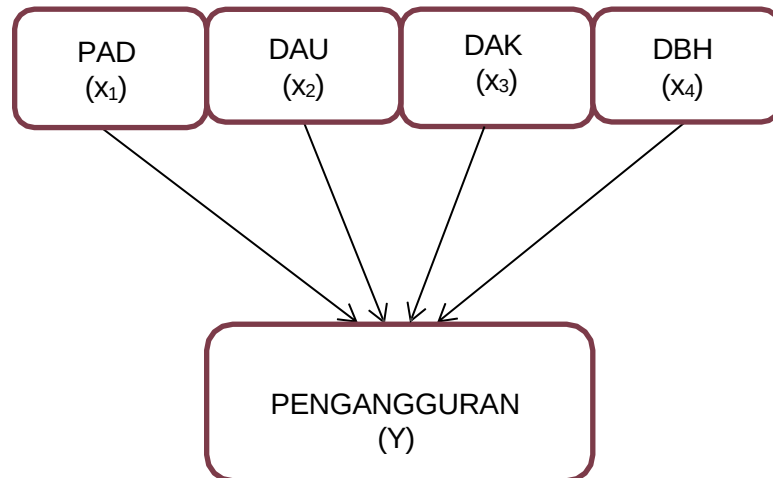
			berganda	berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya, sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
3.	Anti Nur Izzati, LorentinoTogar Laut, Dinar Melani Hutajulu (2021)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY Tahun 2010-2019	Data sekunder, metode analisis regresi data panel	Hasil regresi menunjukkan bahwa: Variabel pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY; Secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

				signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY; variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY; variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.
4.	Ni Luh Gede Cintya Adriani ¹ I Nyoman Mahaendra Yasa (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali		Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung. PAD dan dana perimbangan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dan belanja tidak langsung berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Melalui belanja tidak langsung PAD dan dana

				perimbangan berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berarti belanja tidak langsung merupakan variabel intervening dari PAD dan dana perimbangan
5.	Anis Setiyawati (2007)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran		Hasil penelitian dengan regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum berpengaruh langsung signifikan pada tingkat 0,01 terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara langsung pada tingkat 0,01 terhadap kemiskinan, dan pengangguran, pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

2.3. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir merupakan gambaran umum hubungan antar variabel, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut.



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Secara umum hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Halmahera Selatan.
2. Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Halmahera Selatan.
3. Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Halmahera Selatan.

4. Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan, di mulai dari bulan September – Januari 2023

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan, dan internet serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3. Teknik pengumpulan Data

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Teknik Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dapatkan dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan.

3.4. Model Analisis

Analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul. Untuk menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat yakni tingkat PENGANGGURAN, PAD, DAU DAK, dan DBH. alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan (EViews 10) sebagai alat uji.

Model persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran (unemployment)

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Dana Bagi Hasil (DBH)

e = Variabel gangguan (error)

3.5. Uji Asumsi Regresi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah untuk melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermanfaat. Dalam uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Aulia 2014).

3.5.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.

3.5.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Batas VIF adalah 0,10 artinya jika VIF lebih besar dari 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lain.

3.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan

asumsi klasik Heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidak samaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

3.5.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series) atau ruang (data cross section).

3.6. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan atau kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dan makna penelitian ini , maka penulis menekankan istilah-istilah berikut ini :

1. Pengangguran (Y)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Yang dinyatakan dalam (Jiwa).

2. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp).

3. Dana Alokasi Umum (X_2)

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan APBN. Tujuannya adalah untuk menjamin

pemerataan sumber keuangan di antara berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang dinyatakan dalam angka Rupiah (Rp).

4. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Dana alokasi khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah tertentu dan berasal dari pendapatan APBN. Tujuannya adalah untuk membantu pendanaan kegiatan lokal tertentu yang menjadi prioritas nasional. Yang dinyatakan dalam angka Rupiah (Rp)

5. Dana Bagi hasil (X_4)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang dinyatakan dalam angka Rupiah (Rp).

3.7. Uji Hipotesis

Analisis data menggunakan bantuan program EVIEWS 10 hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam pembuktian hipotesis yang diajukan. pembuktian hipotesis yang diajukan menggunakan uji statistik sebagai berikut:

3.7.1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali, Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikan 0,05 (α 5%).

Diterima atau ditolak dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ atau t hitung signifikan pada taraf kurang dari 5% maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ atau t hitung signifikan pada taraf lebih dari 5% maka hipotesis ditolak

3.7.2. Uji Simultan (Uji f)

Menurut Ghazali (2013), uji f digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikan 0,05 (α 5%).

Diterima atau ditolak dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $f < 0,05$ atau f hitung signifikan pada taraf kurang dari 5% maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi $f > 0,05$ atau f hitung signifikan pada taraf lebih dari 5% maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Unit Observasi

Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Selatan terletak antara 126045' - 129030' BT (Bujur Timur) dan antara 0030' LU (Lintang Utara) dan 2000' LS (lintang Selatan). Secara geografis, Kabupaten Halmahera Selatan berbatasan langsung dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah utara. Sementara untuk di sebelah timur, selatan dan barat, Kabupaten Halmahera Selatan berbatasan dengan wilayah perairan, yaitu Laut Halmahera di sebelah Timur, Laut Banda di sebelah selatan, dan Laut Maluku di sebelah barat.

Luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Selatan 8.779,32 km². Luas daratan Kabupaten Halmahera Selatan hanya 22 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 40.263,72 km². Kabupaten Halmahera Selatan terletak di kawasan timur Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Terdapat 6 pulau besar yaitu Pulau Obi, Pulau Bacan, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, dan Pulau Mandioli. Dua pulau terluas yaitu Pulau Obi yang luasnya sebesar 3.111 km² dan Pulau Bacan sebesar 2053 km². Selain itu, Kabupaten Halmahera Selatan juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, serta daratan Pulau Halmahera yang berbatasan dengan kabupaten Halmahera Tengah.

Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 30 kecamatan. Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan adalah Kecamatan Bacan yang terdapat di Pulau Bacan. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Gane Timur yaitu berjarak 272,6 km dari Kecamatan Bacan. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tinggal di pesisir pantai pada ketinggian satu hingga tujuh meter di atas permukaan laut (mdpl). Kecamatan dengan ketinggian wilayah tujuh mdpl yaitu

Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Kayoa. Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Obi Selatan sebesar 12,34 persen dari total luas seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Kayoa Selatan sebesar 0,30 persen. Secara administratif, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mencakup 250 desa definitif serta ada enam Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

4.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Dalam pembahasan ini akan di jelaskan tahap-tahapan dan pengelolaan data yang kemudian akan dianalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran pada Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan EVIEWS 10 dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda dan Asumsi Klasik.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh DAU, DAK, DBH, PAD dan Pengangguran yang mana pada penelitian ini menggunakan data pada tahun 2011-2021 dengan jumlah observasi sebanyak 10 tahun. Berikut akan disajikan deskripsi data-data dari tiap- tiap variabel yang digunakan :

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yaitu salah satunya Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan agar tercapainya pemerataan pembangunan di daerah itu sendiri. Dalam hal ini Dana Alokasi Umum yang diberikan dikabupaten Halmahera Selatan harus dipergunakan untuk kemakmuran

Daerah dengan melihat potensi yang ada di Daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan penelitian ini data perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Halmahera Selatan di ambil dari Kementrian Keuangan dan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.2
Realiasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2011-2021
(Milyar/Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum
2011	363,900.000.000
2012	64,440.000.000
2013	74,612.000.000
2014	524,914.372.000
2015	553,257.144.000
2016	692,872.748.000
2017	682,940.000.000
2018	448,490.000.000
2019	767,330.000.000
2020	702,340.000.000
2021	693,730.000.000

Sumber : Kementrian Keuangan tahun 2023

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum yang di transfer ke Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak stabil. Jika dilihat Dana Alokasi Umum di Kabupaten Halmahera Selatan tertinggi berada pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp.767,330,000 dan yang terendah berada pada tahun 2012 dengan kisaran hanya mencapai Rp.64,440,000.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tertentu yaitu salah satunya Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang dibutuhkan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional . Dalam hal ini Dana Alokasi Khusus yang diberikan dikabupaten Halmahera Selatan harus

dipergunakan untuk pelayanan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan penelitian ini data perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Halmahera Selatan di ambil dari Kementrian Keuangan dan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Halmahera Selatan tahun
2011- 2021 (Milyar/Rupah)

Tahun	Dana Alokasi Khusus
2011	50,568.800.000
2012	52,612.940.000
2013	67,665.710.000
2014	58,212.790.000
2015	152,453.260.000
2016	175,472.978.000
2017	175,472.978.000
2018	242,796.536.000
2019	75,098.960.000
2020	22,581.000.000
2021	186,136.126.000

Sumber : Kementrian Keuangan tahun 2023

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus yang di transfer ke Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak stabil. Jika dilihat Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Halmahera Selatan tertinggi berada pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp.242,796.536.000 dan yang terendah berada pada tahun 2020 dengan kisaran hanya mencapai Rp. 22,581.000.000.

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan Dana yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yaitu salah satunya Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan angka persentase. Terkait dengan penelitian ini data perkembangan Dana Bagi Hasil di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan dan dapat dilihat melalui tabel berikut

:

Tabel 4.4
Dana Bagi Hasil Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2007-2021
(Milyar/Rupiah)

Tahun	Dana Bagi Hasil (Rupiah)
2011	20,464.000.000
2012	86,746.000.000
2013	64,958.000.000
2014	65,527.000.000
2015	76,054.000.000
2016	63,527.000.000
2017	43,502.000.000
2018	54,093.000.000
2019	69,354.515.000
2020	324,412.000.000
2021	61,241.156.000

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil yang di transfer ke Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak stabil. Jika dilihat Dana Bagi Hasil di Kabupaten Halmahera Selatan tertinggi berada pada tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp.324,412.000.000 dan yang terendah berada pada tahun 2011 dengan kisaran hanya mencapai Rp. 20,464.000.000

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Sebagai salah satu Daerah yang kaya akan sumber daya alam sudah tentu Kabupaten Halmahera Selatan memiliki PAD yang cukup baik. Terkait dengan penelitian ini data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Selatan di ambil dari Kementrian Keuangan dan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2007-2021
(Milyar/Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2011	32,200.000.000
2012	31,100.000.000
2013	44,000.000.000
2014	22,589.364.000
2015	21,911.266.000
2016	17,672.136.000
2017	28,000.000.000
2018	31,500.000.000
2019	58,520.000.000
2020	74,400.000.000
2021	85,430.000.000

Sumber : Kementrian Keuangan tahun 2023

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak stabil. Jika dilihat PAD di Kabupaten Halmahera Selatan tertinggi berada pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp.85,430.000.000 dan yang terendah berada pada tahun 2016 dengan kisaran hanya mencapai Rp. 17,672.136.000.

5. Pengangguran

pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Sedangkan menurut Nanga (2001:253) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Berikut ini merupakan data pengangguran Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2021 :

Tabel 4.6

Jumlah Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2021 (Jiwa)

Tahun	Pengangguran
2011	3.920
2012	4.517
2013	3.955
2014	1.550
2015	6.000
2016	4.680
2017	4.500
2018	4.374
2019	4.375
2020	4.848
2021	2.188

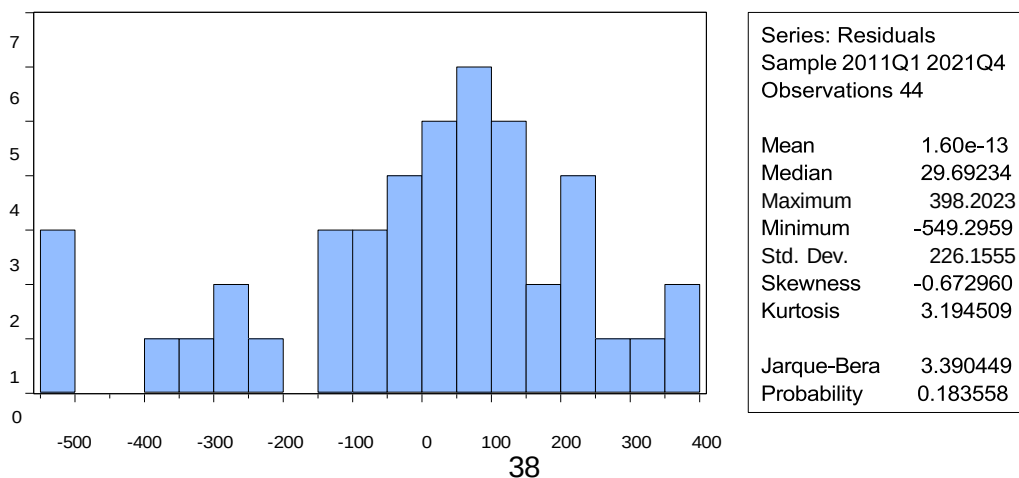
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa selama tahun 2011-2021 tingkat pengangguran mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2015 pengangguran mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 6.000 jiwa dan tingkat pengangguran terendah pada tahun 2014 sebesar 1.550 jiwa.

4.4 Uji Asumsi Regresi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.



Sumber: : *Data sekunder yang diolah EViews 10*

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas dengan nilai *jarque-Bera* sebesar $3.390449 > 2$ (Berarti Signifikan) dan nilai probability sebesar $0.183558 > 5\%$, dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah atau bersitribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau tidak. Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016). Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel.4.7

Hasil Uji Multikolonieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9161.897	7.148579	NA
PAD	6.97E-11	7.227827	1.603754
DAU	7.72E-13	11.85534	2.211516
DAK	9.19E-12	13.62596	2.879237
DBH	3.01E-12	2.262157	1.211658

Sumber: Data sekunder yang diolah EViews 10

Berdasarkan hasil uji multikolonearitas diatas menunjukkan bahwa variabel X1 dengan nilai VIF 1. 603754 (<10), variabel X2 dengan nilai VIF 2.211516 (<10),Variabe X3 dengan nilai VIF 2.879237 (<10) dan variabel X4 dengan nilai VIF 1.211658 (<10). Maka dapat disimpulkan bahawa variabel X1,X2,X3,dan X4 tidak terdapat multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.326843	Prob. F(4,39)	0.0195
Obs*R-squared	11.19392	Prob. Chi-Square(4)	0.0245
Scaled explained SS	9.649688	Prob. Chi-Square(4)	0.0468

Sumber : Data sekunder yang diolah Eviews 10

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diatas, diperoleh bahwa nilai Obs*R-Squared sebesar 11.19392 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0245 atau lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Guna menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Run Test. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	32.09823	Prob. F(32,7)	0.0000
Obs*R-squared	43.70217	Prob. Chi-Square(32)	0.0813

Sumber : Data di olah dari Eviews 10

. Dari hasil uji autokorelasi diatas dengan nilai probability Obs*R-square 0,0813. artinya lebih besar sari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.4 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan layak untuk dilakukan uji statistik selanjutnya yaitu uji hipotesis.

1. Uji Parsial (uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10

Hasil uji parsial (uji t)

Method: Least Squares				
Date: 01/15/24 Time: 16:04				
Sample: 2011Q1 2021Q4				
Included observations: 44				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1141.062	95.71780	11.92111	0.0000
PAD	-4.20E-05	8.35E-06	-5.028818	0.0000
DAU	-2.38E-06	8.78E-07	-2.707545	0.0100
DAK	1.20E-05	3.03E-06	3.975073	0.0003
DBH	6.67E-06	1.74E-06	3.842580	0.0004
R-squared	0.494310	Mean dependent var	1020.614	
Adjusted R-squared	0.442445	S.D. dependent var	318.0278	
S.E. of regression	237.4702	Akaike info criterion	13.88461	
Sum squared resid	2199292.	Schwarz criterion	14.08736	
Log likelihood	-300.4613	Hannan-Quinn criter.	13.95980	
F-statistic	9.530593	Durbin-Watson stat	0.453796	
Prob(F-statistic)	0.000018			

Sumber : Data Sekunder yang diolah Eviews 10

- Variabel PAD (X1) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 5.028818 > *t-tabel* sebesar 1.68488 dengan nilai Prob.sebesar 0.0000 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

- Variabel DAU (X2) memiliki nilai *t-statistic* 2.707545 > t-tabel sebesar 1.68488 dengan nilai prob.0.0100 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- Variabel DAK (X3) memiliki nilai *t-statistic* 3.975073 > t-tabel sebesar 1.68488 dengan nilai Prob. 0.0003 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 Berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- Variabel DBH (X4) memiliki nilai *t-statistic* 3.842580 > t-tabel sebesar 1.68488 dengan nilai Prob. 0.0004 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

2. Uji Simultan (uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Variabel Independen (PAD,DAU,DAK,DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (PENGANGGURAN). Berdasarkan hasil uji simultan di atas diperoleh nilai *f-statistic* sebesar 9.530593 > dari nilai f-tabel 2,46 dengan nilai Prob. Sebesar 0.000018 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent yakni X1,X2,X3 dan X4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan nilai Koefisien Dterminasi (R Square) sebesar 0.494310 hal ini menunjukkan berarti variabel PAD,DAU,DAK dan DBH mempengaruhi peningkatan pengangguran sebesar 49%, Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pengangguran

Pembangunan merupakan sebuah proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai

sebuah kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2000:125). Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah, melalui berbagai sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Salah satu pembangunan daerah dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana, itu merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan uji statistic T diperoleh bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar $-5.028818 >$ dari nilai t tabel sebesar 1.68488 dengan nilai signifikansi sebesar $0,0000 <$ dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Luh, Cintya, and Yasa n.d.) menunjukan bahwa, hubungan positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini karena pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak langsung dipergunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan teori Kuznet yang menyatakan bahwa setiap terjadinya peningkatan akan diiringi oleh peningkatan kesenjangan dalam jangka pendek.

Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, namun juga perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri. Pengelolaan alokasi anggaran berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kegiatan di sektor perikanan, perdagangan, pertanian, jasa, industri, pariwisata serta sektor-sektor lainnya. Selain dari pada itu sektor-sektor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan pemerintah mampu mengimplementasikan dengan baik maka akan menekan jumlah pengangguran dan kesenjangan sosial lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian dengan menggunakan EVIEWS versi 10 diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Terlihat dari nilai t hitung sebesar $2.707545 > 1.68488$ dengan nilai signifikansi $0.0100 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bila semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) tentu akan mempengaruhi penurunan terhadap pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan dikarenakan, Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diaokasikan di setiap Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pemerataan perekonomian daerah dengan mendanai dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan ekonomi. Dalam teori yang dikemukakan oleh John Maynerd Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi akibat depresi ekonomi. Menurut Keynes (1936) pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif, dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berbagai hasil penelitian sebelumnya juga telah mendukung, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Rizal Yani,dkk 2021) bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Pengangguran

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $3.975073 > 1.68488$, dengan nilai koefisien regresi sebesar $(1,20)$ menunjukkan bahwa setiap penambahan Dana Alokasi

Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat pengangguran berkurang sebesar 1,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bila semakin tinggi DAK maka akan mempengaruhi penurunan terhadap pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pengaruh DAK terhadap pengangguran menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah efektif, efisien dan tepat sasaran dalam menggunakan dana alokasi khusus yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran. Pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, karena strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi ketimpangan daerah. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja yang tentunya berhubungan dengan belanja pembangunan, dengan demikian strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Luh, Cintya, and Yasa n.d.) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Tingkat Pengangguran

Dana bagi hasil adalah anggaran yang disalurkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. DBH memiliki peran yang besar dalam mendorong dan mengurangi ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Fungsi DBH sebagai *block grant* memberikan kewenangan penggunaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Pengujian atas hipotesis yang dirumuskan terkait pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat pengangguran melalui nilai t hitung menunjukkan bahwa, t hitung sebesar 3.842580 >

1.68488 dengan nilai signifikansi sebesar $0.0004 < 0,05$ artinya Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini digambarkan sejak tahun 2011 DAU yang menjadi instrument utama dana perimbangan yang secara rutin disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan terus mengalami peningkatan, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun. Halmahera selatan dikenal sebagai daerah dengan sektor pertambangan dan perikanan yang cukup unggul sehingga melalui pemanfaatan sektor yang baik maupun peningkatan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil di Kabupaten Halmahera Selatan yang cenderung mengalami peningkatan, diikuti dengan penurunan terhadap tingkat pengangguran. Artinya pembiayaan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memberikan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putro 2016) yang menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan adanya DBH Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk mengurangi pengangguran di wilayah Sumatra.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran yang di peroleh dalam penelitian ini karena pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak langsung dipergunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan bila semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) tentu akan mempengaruhi penurunan terhadap pengangguran di kabupaten Halmahera selatan .
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa bila semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan mempengaruhi penurunan terhadap pengangguran di kabupaten Halmahera selatan.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Jika Dana Bagi Hasil (DBH) cenderung mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi penurunan terhadap pengangguran di kabupaten Halmahera selatan.

5.2. Saran

Pada hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan mampu mengelola beberapa sektor-sektor unggulan secara keseluruhan guna mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu pula, terfokus untuk mengalokasikan pembiayaan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dan jeli dalam realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bagi Hasil untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Untuk para penulis kedepannya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait tingkat pengangguran di kabupaten Halmahera selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. sehingga diharapkan khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kabupaten Halmahera selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, priyo hari. 2005. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali)." *Jurnal interdisipliner kritis UKSW* (Mardiasmo 2002): 1–20.
- Ali, Karnila, and Nur Wahyu Ningsih. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran." *Derivatif : Jurnal Manajemen* 15(1): 85–101.
- Aulia, Nely. 2014. "Nely Aulia Economics Development Analysis Journal." 3(2): 327–36.
- Ghozali.I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* 23. semarang: Universitas diponegoro.
- Heliyanto, Firnandi dan Nur Handayani. 2016. "Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : 5(3): 1–17.
- Izzati, Anti Nur. 2021. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi DIY Tahun 2010-2019." *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 3(1): 69–86.
- Kresandra, Agung. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi."
- Luh, Ni, Gede Cintya, and I Nyoman Mahaendra Yasa. "PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN MELALUI BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Indonesia Termasuk Negara Yang Sedang Berkembang Yang Masih Memiliki." : 1328–56.
- Mahsunah, Durrotul. 2013. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1(3): 1–17.

- Putro, Riski Prasetyo. 2016. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Di Wilayah Sumatera." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 1(2): 81–95.
- R.Siagian, Altito. 2010. "ALTITO R. SIAGIAN. DAERAH DAN KETIMPANGAN WILAYAH (STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT)."
- Rasu, Konny J.E, Anderson G. Kumenaung, and Rosalina A.M Koleangan. 2019. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 20(2): 1.
- Saputri, Gita 2021. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam."
- Sayifullah, Sayifullah, and Tia Ratu Gandasari. 2016. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten." *Jurnal Ekonomi-Qu* 6(2): 236–55.
- Sukmaraga, Prima. 2011. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah." *Harvard Business Review* 85(3): 21–22.
- Wahyudiana, Vika Putri. 2017. "PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN."

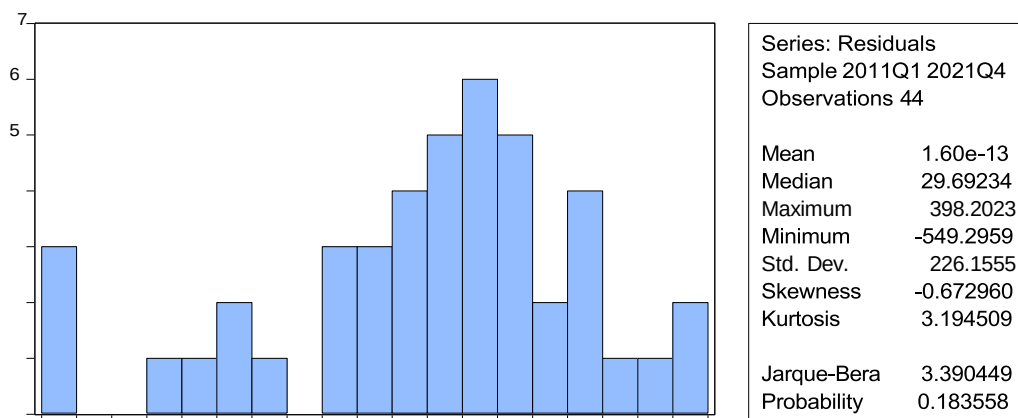
LAMPIRAN

Lampiran 1. Data setelah di interpolasi

UNEM	PAD	DAU	DAK	DBH
1.044166	3975159	50144705	6475903	7545614
1.04307	4263125	53699102	7975592	8177614
1.041975	4551091	57253499	9475281	8809614
1.04088	4839057	60807895	10974971	9441613
1.039784	5127023	64362292	12474660	10073613
1.038689	5414989	67916688	13974349	10705612
1.037593	5702955	71471085	15474038	11337612
1.036498	5990921	75025482	16973727	11969612
1.035402	6278887	78579878	18473416	12601611
1.034307	6566853	82134275	19973105	13233611
1.033211	6854819	85688672	21472794	13865611
1.032116	7142784	89243068	22972483	14497610
1.03102	7430750	92797465	24472172	15129610
1.029925	7718716	96351862	25971861	15761609
1.02883	8006682	99906258	27471550	16393609
1.027734	8294648	1.03E+08	28971239	17025609
1.026639	8582614	1.07E+08	30470928	17657608
1.025543	8870580	1.11E+08	31970617	18289608
1.024448	9158546	1.14E+08	33470306	18921608
1.023352	9446512	1.18E+08	34969996	19553607
1.022257	9734478	1.21E+08	36469685	20185607
1.021161	10022444	1.25E+08	37969374	20817606
1.020066	10310409	1.28E+08	39469063	21449606
1.01897	10598375	1.32E+08	40968752	22081606
1.017875	10886341	1.35E+08	42468441	22713605
1.01678	11174307	1.39E+08	43968130	23345605
1.015684	11462273	1.43E+08	45467819	23977604
1.014589	11750239	1.46E+08	46967508	24609604
1.013493	12038205	1.5E+08	48467197	25241604
1.012398	12326171	1.53E+08	49966886	25873603
1.011302	12614137	1.57E+08	51466575	26505603
1.010207	12902103	1.6E+08	52966264	27137603
1.009111	13190069	1.64E+08	54465953	27769602
1.008016	13478034	1.67E+08	55965642	28401602
1.00692	13766000	1.71E+08	57465331	29033601
1.005825	14053966	1.75E+08	58965021	29665601
1.00473	14341932	1.78E+08	60464710	30297601

1.003634	14629898	1.82E+08	61964399	30929600
1.002539	14917864	1.85E+08	63464088	31561600
1.001443	15205830	1.89E+08	64963777	32193599
1.000348	15493796	1.92E+08	66463466	32825599
0.999252	15781762	1.96E+08	67963155	33457599
0.998157	16069728	1.99E+08	69462844	34089598
0.997061	16357694	2.03E+08	70962533	34721598

Lampiran 2. Uji Persyaratan Anslisis



Variable	Coefficient	Uncentered Variance	Centered VIF
C	9161.897	7.148579	NA
PAD	6.97E-11	7.227827	1.603754
DAU	7.72E-13	11.85534	2.211516
DAK	9.19E-12	13.62596	2.879237
DBH	3.01E-12	2.262157	1.211658

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.326843	Prob. F(4,39)	0.0195
Obs*R-squared	11.19392	Prob. Chi-Square(4)	0.0245
Scaled explained SS	9.649688	Prob. Chi-Square(4)	0.0468

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	32.09823	Prob. F(32,7)	0.0000
Obs*R-squared	43.70217	Prob. Chi-Square(32)	0.0813

Method: Least Squares
Date: 01/15/24 Time: 16:04
Sample: 2011Q1 2021Q4
Included observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1141.062	95.71780	11.92111	0.0000
PAD	-4.20E-05	8.35E-06	-5.028818	0.0000
DAU	-2.38E-06	8.78E-07	-2.707545	0.0100
DAK	1.20E-05	3.03E-06	3.975073	0.0003
DBH	6.67E-06	1.74E-06	3.842580	0.0004
R-squared	0.494310	Mean dependent var	1020.614	
Adjusted R-squared	0.442445	S.D. dependent var	318.0278	
S.E. of regression	237.4702	Akaike info criterion	13.88461	
Sum squared resid	2199292.	Schwarz criterion	14.08736	
Log likelihood	-300.4613	Hannan-Quinn criter.	13.95980	
F-statistic	9.530593	Durbin-Watson stat	0.453796	
Prob(F-statistic)	0.000018			